

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Inflasi Daerah
2. Inflasi Triwulan I

Perkembangan inflasi di Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama pada awal tahun, sebelum kemudian mengalami kecenderungan penurunan tekanan pada akhir triwulan. Secara umum, kondisi inflasi masih berada dalam rentang yang relatif terkendali, namun terdapat indikasi peningkatan tekanan yang perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi ke depan.

Berikut perkembangan laju inflasi selama triwulan I 2026 :

Laju Inflasi (%)	Januari	Februari	Maret
Bulanan (mtm)	0,04	0,60	0,72
Tahun Kalender (ytd)	0,04	0,64	1,37
Tahunan (yoy)	3,76	4,64	3,31

Secara tahunan (yoy), inflasi Kaltim pada periode Januari hingga Maret 2026 tercatat masing-masing sebesar **3,76% pada Januari, meningkat menjadi 4,64% pada Februari, dan kemudian menurun menjadi 3,31% pada Maret**. Dengan demikian, selama Triwulan I 2026, inflasi berada pada kisaran **3,31% hingga 4,64% (yoy)**. Sementara itu, secara kumulatif (ytd), inflasi hingga akhir Maret 2026 tercatat sebesar **1,37%**, yang menunjukkan bahwa tekanan harga secara agregat masih dalam batas yang dapat dikendalikan

Lebih lanjut, secara spasial, perkembangan IHK dan inflasi menunjukkan adanya variasi antar kabupaten/kota yang mencerminkan perbedaan karakteristik ekonomi dan distribusi di masing-masing wilayah. Pada Januari 2026, Kota Samarinda mencatat inflasi bulanan sebesar 0,26% (mtm) sebagai yang tertinggi di Kalimantan Timur, sementara itu Kabupaten Berau mencatat inflasi bulanan sebesar -0,32% (mtm) sebagai yang terendah. Pada Februari 2026, Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat inflasi bulanan sebesar **0,89% (mtm)** sebagai yang tertinggi di Kalimantan Timur. Sementara itu, Kabupaten Berau mencatat inflasi sebesar **0,17% (mtm)** sebagai yang terendah

Memasuki Maret 2026, IHK di seluruh wilayah mengalami peningkatan seiring dengan masih berlanjutnya kenaikan harga. Kabupaten Penajam Paser Utara kembali mencatat inflasi tertinggi sebesar **1,09% (mtm)**, sedangkan Kota Balikpapan mencatat inflasi terendah sebesar **0,51% (mtm)** .

2. Perkembangan Inflasi Bulan Januari 2026

Pada Januari 2026, Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi bulanan (yoy) sebesar **3,76%**, yang menunjukkan adanya peningkatan tekanan harga dibandingkan periode akhir tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan mulai terbentuknya tekanan inflasi pada awal tahun, seiring dengan normalisasi aktivitas ekonomi pasca periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru serta meningkatnya konsumsi masyarakat.

Berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi Kaltim periode Januari 2026 disumbangkan terutama oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Peningkatan kelompok ini didorong oleh meningkatnya harga emas yang mengalami kenaikan mencapai Rp2.860.000,00 (*highest price*) atau rata-rata Rp2.800.000,00 per gram. Selanjutnya kelompok pakaian dan alas kaki, serta kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga juga turut menyumbangkan andil inflasi Kaltim pada periode laporan. Peningkatan permintaan komoditas pakaian serta tarif air minum PAM sebagai dampak meningkatnya harga operasional menjadi penyebab kondisi peningkatan pada kedua kelompok tersebut. Peningkatan tekanan lebih tinggi tertahan oleh adanya penurunan harga kelompok bahan makanan dan transportasi yang sempat meningkat di momen HBKN Natal dan Tahun Baru..

Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi Provinsi Kaltim periode Januari 2026 tertuang dalam tabel berikut :

Komoditas Inflasi	emas perhiasan	Komoditas Inflasi	tarif listrik
	angkutan udara		emas perhiasan
Komoditas Andil mtm	cabai rawit	Komoditas Andil yoy	ikan layang/ ikan benggol
	daging ayam ras		beras
Komoditas Deflasi	bahan bakar rumah tangga	Komoditas Deflasi	sigaret kretek mesin (SKM)
	Angkutan Udara		bensin
Komoditas Deflasi	Bensin	Komoditas Deflasi	sabun detergen bubuk
	Cabai Rawit		baju muslim wanita
Komoditas Deflasi	Bawang Merah	Komoditas Deflasi	pengharum cucian/pelembut
	Cabai Merah		telepon seluler

Sumber : BPS Kaltim

3. Perkembangan Inflasi Bulan Februari 2026

Pada Februari 2026, Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar **0,60% (mtm)** dan **4,64% (yoy)**. Secara tahunan, inflasi ini merupakan yang tertinggi selama Triwulan I 2026, menunjukkan adanya peningkatan tekanan harga yang cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi Provinsi Kaltim periode Februari 2026 tertuang dalam tabel berikut :

Komoditas Inflasi	Emas perhiasan	Komoditas Inflasi	tarif listrik
	Angkutan udara		Emas perhiasan
Komoditas Andil mtm	Cabai rawit	Komoditas Andil yoy	Ikan layang/ ikan benggol
	Daging ayam ras		Beras
Komoditas Deflasi	Bahan bakar RT	Komoditas Deflasi	Sigaret kretek mesin
	Baju muslim wanita		bensin
Komoditas Deflasi	Baju muslim anak	Komoditas Deflasi	Sabun dtergen bubuk
	Pengharum cucian/pelembut		Baju muslim wanita
Komoditas Deflasi	Bawang merah	Komoditas Deflasi	Pengharum cucian/ pelembut

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Februari 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring peningkatan permintaan menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026, serta momen Tahun Baru Imlek 2026. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut memberikan andil besar yang didorong tren kenaikan emas perhiasan (rata-rata sekitar Rp3.085.000 per gram pada Februari 2026). Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan kelompok transportasi, seiring penurunan harga BBM non-subsidi pada awal Februari sekitar 3 – 4%.

Secara spasial, tekanan inflasi tahunan pada Februari 2026 menunjukkan variasi antar wilayah. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Samarinda sebesar **5,29% (yoy)**, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar **4,13% (yoy)**. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi cenderung mengalami tekanan harga yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya.

4. Perkembangan Inflasi Bulan Maret2026

ndeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Timur pada Maret 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,72% (mtm), dengan inflasi tahunan dan tahun kalender masing-masing sebesar 3,31% (yoy) dan 1,37% (ytd). Secara tahunan, inflasi Kaltim tercatat lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 3,48% (yoy). dan mengalami penurunan dibandingkan Februari, namun secara bulanan justru menunjukkan peningkatan tekanan harga.

Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi Provinsi Kaltim periode Maret 2026 tertuang dalam tabel berikut :

Komoditas Andil mtm	Komoditas Inflasi	Komoditas Andil yoy	Komoditas Inflasi
	Cabai rawit		Emas perhiasan
	Bensin		Tarif listrik
	Ikan segar		Daging ayam ras
	Tomat		Beras
	Daging ayam ras		Ikan layang
	Komoditas Deflasi		Komoditas Deflasi
	Emas perhiasan		Sabun detergen bubuk
	Parfum		Pengharum cucian / pelembut
	Tas sekolah		Pembersih lantai

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Maret 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring peningkatan permintaan komoditas pangan strategis pada momentum Idulfitri 2026. Selain itu, kelompok transportasi turut memberikan andil inflasi, didorong peningkatan mobilitas dan permintaan angkutan udara terindikasi dari tingginya okupansi dan cepat terserapnya (*extra flight*). Sementara itu, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, sejalan dengan koreksi harga pada beberapa komoditas kelompok tersebut, termasuk emas perhiasan.

Secara spasial, tekanan inflasi pada Maret 2026 masih menunjukkan pola yang relatif sama, di mana wilayah perkotaan mencatat inflasi lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Kota

Samarinda mengalami inflasi tertinggi sebesar **3,92% (yoy)** sedangkan Kabupaten Berau mencatat inflasi terendah sebesar **2,38% (yoy)**. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan konsumsi yang lebih tinggi di wilayah perkotaan masih menjadi faktor pendorong utama tekanan inflasi.

1. Risiko Inflasi Triwulan II 2026

Memasuki triwulan II tahun 2026, perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim) dihadapkan pada sejumlah tantangan dan risiko inflasi yang perlu diwaspadai.

Faktor-Faktor Risiko Utama Inflasi Kaltim Triwulan II 2026 :

1. Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah

Kaltim masih sangat bergantung pada pasokan komoditas pangan dari daerah lain. Risiko ini bersifat struktural dan berdampak luas karena setiap gangguan di daerah pemasok akan langsung memicu kenaikan harga di Kaltim. Dampaknya cepat, luas, dan sulit dikendalikan dalam jangka pendek.

2. Gangguan produksi pangan akibat faktor cuaca (El Nino)

Potensi cuaca ekstrem berisiko mengganggu produksi komoditas strategis, khususnya hortikultura. Penurunan produksi dapat langsung menyebabkan kelangkaan pasokan di pasar, yang biasanya diikuti lonjakan harga yang tajam

3. Volatilitas harga komoditas pangan strategis

Komoditas seperti cabai, bawang merah, dan daging ayam ras memiliki karakter harga yang sangat fluktuatif. Perubahan kecil pada pasokan atau permintaan dapat memicu lonjakan harga yang signifikan dalam waktu singkat.

4. Tekanan harga energi (administered prices)

Potensi kenaikan BBM dan LPG memiliki dampak sistemik karena tidak hanya memengaruhi harga energi, tetapi juga meningkatkan biaya distribusi dan produksi, sehingga mendorong inflasi secara luas.

5. Keterbatasan dan tingginya biaya distribusi/logistik

Tingginya biaya logistik serta potensi gangguan distribusi akibat cuaca dan infrastruktur menyebabkan harga menjadi lebih mahal di tingkat konsumen. Dampaknya cukup signifikan, namun masih dapat dikelola melalui intervensi distribusi.

6. Peningkatan permintaan masyarakat (demand side pressure)

Konsumsi masyarakat yang masih tinggi pasca Ramadan dan Idulfitri berpotensi mendorong kenaikan harga. Risiko ini bersifat musiman dan relatif dapat diantisipasi melalui pengendalian pasokan.

Keterbatasan ruang fiskal daerah

7.

Efisiensi anggaran dapat membatasi kapasitas intervensi pemerintah daerah, namun dampaknya tidak langsung terhadap inflasi, melainkan pada efektivitas pengendalian.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I Tahun 2026 masih menghadapi sejumlah permasalahan, baik yang bersifat struktural maupun teknis operasional. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dinamika harga, tetapi juga mencerminkan keterbatasan sistem produksi, distribusi, serta kapasitas intervensi kebijakan di daerah.

1. Tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Sebagian besar komoditas pangan strategis, seperti beras, cabai, bawang, dan daging ayam, masih dipasok dari provinsi lain. Kondisi ini menyebabkan stabilitas harga di Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi dan distribusi di daerah pemasok. Ketika terjadi gangguan pasokan, baik akibat cuaca maupun distribusi, dampaknya langsung dirasakan dalam bentuk kenaikan harga di daerah.

1. Keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya distribusi.

Kondisi geografis Kalimantan Timur yang luas serta belum meratanya infrastruktur transportasi menyebabkan proses distribusi barang menjadi kurang efisien. Hal ini mengakibatkan tingginya biaya logistik yang pada akhirnya meningkatkan harga barang di tingkat konsumen. Selain itu, gangguan distribusi akibat cuaca atau kondisi jalan juga dapat memperburuk ketidakstabilan harga.

1. Volatilitas harga komoditas pangan strategis

Komoditas seperti cabai, bawang merah, dan daging ayam ras memiliki karakteristik harga yang sangat fluktuatif. Perubahan kecil pada sisi pasokan maupun permintaan dapat menyebabkan lonjakan harga yang signifikan, sehingga menyulitkan upaya stabilisasi harga dalam jangka pendek.

1. Tingginya kontribusi komponen energi terhadap inflasi daerah

Kenaikan harga energi, khususnya tarif listrik dan potensi penyesuaian harga BBM, memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap inflasi. Dampak tidak langsung tersebut terjadi melalui peningkatan biaya distribusi dan produksi, yang kemudian mendorong kenaikan harga barang dan jasa lainnya.

1. Keterbatasan ruang fiskal daerah dalam melakukan intervensi pengendalian inflasi

Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan alokasi untuk kegiatan pengendalian inflasi menjadi lebih terbatas, sehingga intervensi yang dilakukan, seperti operasi pasar atau subsidi distribusi, belum dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, permasalahan pengendalian inflasi di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada pengendalian harga di hilir, tetapi juga pada penguatan sisi hulu (produksi), distribusi, serta efektivitas kebijakan intervensi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada identifikasi permasalahan secara menyeluruh.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I Tahun 2026 dilaksanakan melalui pendekatan terintegrasi dalam kerangka **4K**, yaitu :

1. Keterjangkauan Harga

Pada aspek keterjangkauan harga, kebijakan difokuskan pada upaya stabilisasi harga melalui intervensi langsung di pasar. Pemerintah daerah bersama TPID melaksanakan **Gerakan Pangan Murah (GPM)** dan **operasi pasar** di berbagai wilayah, khususnya pada daerah dengan tekanan inflasi tinggi dan menjelang periode HBKN. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi tekanan harga pada komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan daging ayam ras.

Selain itu, intervensi harga juga dilakukan melalui penyaluran komoditas bersubsidi, seperti beras SPHP dan Minyakita, guna memastikan harga tetap berada dalam jangkauan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam hal cakupan wilayah dan keberlanjutan intervensi, sehingga efektivitasnya cenderung bersifat jangka pendek.

2. Ketersediaan Pasokan

Pada aspek ketersediaan pasokan, kebijakan diarahkan untuk memastikan kecukupan stok komoditas pangan, baik melalui sumber produksi lokal maupun pasokan dari luar daerah. **Pemantauan stok pangan secara berkala** serta pemanfaatan **cadangan pangan pemerintah (CPP)** sebagai buffer stock dalam mengantisipasi potensi kekurangan pasokan. Penyaluran beras melalui program SPHP juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan barang di pasar.

Meskipun demikian, ketergantungan terhadap pasokan luar daerah masih menjadi kendala utama, sehingga stabilitas pasokan belum sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.

3. Kelancaran Distribusi

Dalam aspek kelancaran distribusi, kebijakan difokuskan pada upaya menjaga kelancaran arus barang dari produsen ke konsumen. TPID melakukan **pemantauan distribusi dan harga secara rutin**, serta melaksanakan **inspeksi mendadak (sidak)** untuk memastikan tidak terjadi hambatan distribusi maupun praktik penimbunan.

Koordinasi dengan distributor, pelaku usaha, dan instansi teknis terus diperkuat untuk menjaga stabilitas distribusi, terutama pada komoditas pangan segar yang rentan terhadap gangguan. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong perbaikan infrastruktur distribusi untuk menekan biaya logistik.

Namun demikian, keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis masih menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi, yang pada akhirnya berdampak pada disparitas harga antar wilayah.

4. Komunikasi Efektif

Pada aspek komunikasi efektif, kebijakan diarahkan untuk menjaga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap perkembangan harga. Pemerintah daerah secara aktif melakukan **publikasi informasi harga dan ketersediaan pangan**, serta menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak.

Selain itu, komunikasi juga dilakukan melalui **rapat koordinasi pengendalian inflasi**, termasuk High Level Meeting (HLM), yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Arahan pimpinan daerah dalam berbagai forum juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas psikologis pasar.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I Tahun 2026 secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menjaga stabilitas harga, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah keterbatasan. Hal ini tercermin dari inflasi yang masih berada dalam rentang terkendali, meskipun sempat mengalami peningkatan pada Februari 2026 sebelum kembali menurun pada Maret 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang dilakukan mampu meredam tekanan inflasi, namun belum sepenuhnya mampu menghilangkan sumber tekanan secara mendasar
- Dari sisi **keterjangkauan harga**, pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) terbukti cukup efektif dalam menahan lonjakan harga komoditas pangan strategis dalam jangka pendek, terutama pada periode meningkatnya permintaan. Namun demikian, intervensi ini masih bersifat sementara dan belum mampu memberikan dampak stabilisasi harga secara berkelanjutan, terutama pada komoditas yang memiliki volatilitas tinggi seperti cabai dan bawang merah.
- Pada aspek **ketersediaan pasokan**, upaya penguatan kerjasama antar daerah dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah telah membantu menjaga ketersediaan barang di pasar. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas oleh tingginya

ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengendalikan harga ketika terjadi gangguan pada daerah pemasok, sehingga risiko inflasi masih cukup tinggi.

- Dalam aspek **kelancaran distribusi**, pemantauan distribusi dan pelaksanaan sidak pasar telah berjalan dengan baik dalam mengidentifikasi potensi hambatan di lapangan. Meskipun demikian, permasalahan struktural seperti tingginya biaya logistik dan keterbatasan infrastruktur distribusi masih menjadi kendala utama yang belum dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Dampaknya, disparitas harga antar wilayah masih terjadi dan menjadi salah satu faktor penyumbang inflasi.
- Sementara itu, pada aspek **komunikasi efektif**, pemerintah daerah telah secara aktif menyampaikan informasi harga dan melakukan koordinasi melalui berbagai forum. Upaya ini cukup membantu dalam menjaga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Meningkatkan efektivitas intervensi keterjangkauan harga

Memperluas pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan fokus pada komoditas bergejolak (cabai, bawang merah, daging ayam ras), serta memastikan pelaksanaan berbasis data dan tepat sasaran di wilayah dengan tekanan inflasi tinggi.

2. Memperkuat produksi pangan lokal

Mendorong optimalisasi lahan dan pengembangan sentra produksi komoditas strategis guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, termasuk melalui sinergi dengan OPD teknis dan dukungan program pertanian.

3. Mengoptimalkan kerjasama antar daerah (KAD)

Memperkuat perjanjian pasokan dengan daerah produsen utama berbasis komoditas strategis, sehingga kontinuitas pasokan lebih terjamin dan risiko gangguan dapat diminimalkan.

4. Meningkatkan efisiensi distribusi dan menekan biaya logistik

Memperkuat koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha, mengatasi hambatan distribusi, serta mendorong pemanfaatan jalur distribusi alternatif untuk menjaga kelancaran pasokan antar wilayah.

5. Memanfaatkan sistem early warning inflasi berbasis data real-time/MANDAU KALTIM

Memperkuat pemantauan harga dan stok secara harian serta meningkatkan kualitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan antisipatif.

6. Mengantisipasi dampak kenaikan harga energi

Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga stabilitas pasokan BBM dan LPG, serta menyiapkan langkah mitigasi terhadap dampaknya pada biaya distribusi dan harga barang.

7. Mengoptimalkan penggunaan anggaran pengendalian inflasi

Mengarahkan alokasi anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap stabilisasi harga, seperti intervensi pasokan dan distribusi, serta mengurangi kegiatan yang kurang berdampak.

8. Menerapkan pendekatan kebijakan berbasis spasial

Memfokuskan intervensi pada wilayah dengan inflasi tinggi dan juga disparitas harga yang tinggi seperti Kota Samarinda, sehingga kebijakan lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik tekanan inflasi di masing-masing daerah